

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

(Studi Kasus di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

BRIGITA FANIA PAMBELLA

1117 29909

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2021**

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Kasus Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BRIGITA FANIA PAMBELLA

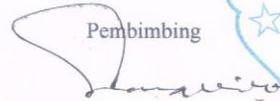
No Induk Mahasiswa: 111729909

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

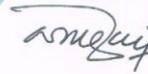
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Soegiharto, Dr., M.Acc., Ak., CA.

Penguji



Wing Wahyu Wianarno, Dr., MAFIS., Ak., CA.

Yogyakarta, 16 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Brigita Fania Pambella

Jurusan Akuntansi, STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

email: fanyapambella13@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that are suspected to affect the accountability of village fund management, as well as whether the presence of a moderating variable (financial management transparency) can strengthen or weaken the influence of the independent variable on the dependent variable. This research was conducted at the village government in Sengah Temila District, Landak Regency. The analytical method used is multiple linear regression and interaction test (MRA). Primary data was obtained by distributing questionnaires. Sampling using accidental sampling. The results of this study indicate that the leadership style internal control system has a negative and significant effect on village fund management accountability, community participation, village apparatus competence, and accessibility have no significant effect on village fund management accountability, and the moderating variable financial management transparency only acts as a homoglycer. moderating, because it does not interact with the independent variable and has no significant effect on the accountability of village fund management.

Keywords: village fund management accountability, financial transparency, village fund management, village government internal control system, community

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

participation, village apparatus competence, financial report accessibility, leadership style.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang di duga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta apakah dengan adanya variabel pemoderasi (transparansi pengelolaan keuangan) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji interaksi (MRA). Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa, dan aksesibilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan variabel pemoderasi transparansi pengelolaan keuangan hanya berperan sebagai *Homoglisier* moderasi, karena tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Keuangan, Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Gaya Kepemimpinan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 06 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa merupakan integritas masyarakat yang menetapkan hukumnya sendiri, yang dimana antar wilayahnya memiliki batasan-batasan dan otoritas untuk menata dan mengelola masalah-masalah dalam pemerintahan, serta kepentingan masyarakat di wilayah tersebut menurut inisiatif sendiri dengan didasarkan pada aspirasi-aspirasi masyarakat, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pengelolaan dana desa meliputi pengaturan, penganggaran, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan (Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2). Kegiatan-kegiatan seperti pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kegiatan-kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan dana desa (Hariyati, dkk 2018). Untuk menciptakan kesetaraan dalam ekonomi di desa, pemerintah berupaya mewujudkannya melalui penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggaran yang perlu disempurnakan (Wibowo, 2019).

Masalah-masalah yang sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa yakni: ketidakefektifan dalam pengendalian internal pemerintah desa, ketidaksiapan sumber daya manusia yang mengelola dana desa, minimnya warga yang berpartisipasi, terbatasnya akses terhadap data informasi mengenai pengalokasian dana yang diterima suatu desa, kualitas kinerja kepemimpinan kepala desa, dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masalah-masalah tersebut menjadi pemicu terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam tren penindakan kasus yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) meninjau permasalahan korupsi sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai 154 kasus, dan setelah diamati 82 persennya merupakan kasus korupsi terhadap anggaran desa.

ICW menjelaskan bahwa masalah korupsi di tingkat desa harus diberi perhatian serius. Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa semestinya memberikan perhatian lebih mengenai pencegahan terjadinya peluang-peluang untuk melakukan korupsi. Meningkatkan kapasitas aparat desa sebagai pengelola dana, dimulai dari aspek regulasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada tingkatan teknis lain terkait pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dengan menyusun model penelitian baru untuk menjawab inkonsistensi hasil riset sebelumnya dengan menggunakan variabel bebas sistem pengendalian internal pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan gaya kepemimpinan dengan variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan menggunakan variabel pemoderasi yaitu transparansi pengelolaan keuangan.

LANDASAN TEORI

Resource Base View

Teori *Resource Based View* (RBV) pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984). Dalam teori ini mengatakan bahwa kemampuan daya saing sebuah perusahaan didalam mencapai keunggulan kompetitif, didasari oleh sumber daya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan kompetensi yang ada didalam perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah jika sebuah perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi keunggulan bagi perusahaan itu sendiri.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan atau *Compliance Theory* adalah teori yang dikemukakan oleh Tyler Saleh (2004). Pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses bermasyarakat. Pengimplementasian undang-undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan teori kepatuhan dalam mengelola dana desa.

Teori Kepemimpinan

Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Fiedler ini menyatakan bahwa situasi dan kondisi menjadi faktor yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam menentukan gaya yang akan diterapkan, tidak ada gaya kepemimpinan yang sama terhadap semua badan atau lembaga. Fiedler.

Teori Agensi

Dalam teori agensi dijelaskan tentang hubungan antara 2 pihak, yaitu pemberi amanah dan pihak yang menjalankannya, hubungan antara 2 pihak, yaitu pemberi amanah dan pihak yang menjalankannya, hubungan ini dilakukan berdasarkan kontrak perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum didalamnya (Ismail dan Widagdo, 2016). Dalam pemerintahan desa, *principals* adalah rakyat, sedangkan *agent* adalah pemerintah, yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya.

Teori Sinyal

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Teori sinyal merupakan teori yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973, teori

ini mengemukakan bagaimana seharusnya pemerintah memberi informasi yang dapat berupa laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan tersebut. Pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi memberi penjelasan bagaimana cara sebuah organisasi untuk menyesuaikan antara keinginan masyarakat di sekitar organisasi berada dengan kegiatan yang akan dilakukan, serta pihak organisasi juga mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dapat menanggapi nilai-nilai yang ada di lingkungan organisasi. Pertukaran informasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat di dorong oleh adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang menjadi kepentingan masyarakat, maka kebijakan yang dirumuskan melalui keikutsertaan masyarakat menjadi lebih realistis. Kim dan Schatchter (2013)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa

Pentingnya meningkatkan pengendalian internal bertujuan agar sebuah anggaran dapat dikelola dengan bijak, sehingga dengan pengelolaan tersebut tujuan dalam sebuah organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal desa digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan yang dilakukan organisasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek didalamnya, seperti biaya, manfaat dan sumber daya manusia (Nurmalasari, 2020:3).

Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat desa didasari oleh peran serta masyarakat, dengan kata lain pembangunan masyarakat desa dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu melakukan suatu usaha yang dapat membuat masyarakat merasakan bahwa pembangunan adalah suatu kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. (Mahayani, 2017).

Kompetensi Aparat Desa

Salah satu unsur yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah sumber daya manusia yang dimiliki (Sukmawan, 2013). Pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada aparat desa dalam menangani pengelolaan dana desa memerlukan kompetensi yang cukup dibidangnya. Aparat yang mampu bekerja secara produktif, efektif, dan efisien, didorong oleh kompetensi yang tinggi. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki ini dapat membuat kinerja pengelolaan keuangan juga mengalami peningkatan (Safwan, dkk dalam Ladapase, 2019: 3).

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Agar prinsip akuntabilitas dapat terpenuhi maka pemerintah harus dapat memberi kebebasan untuk mengakses bagi anggota masyarakat, untuk mencari tahu dan memperoleh informasi yang sesuai mengenai sebuah laporan keuangan. Meningkatkan aksesibilitas dalam laporan keuangan salah satunya adalah dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memberi fasilitas kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012: 139&142). Dengan adanya kemudahan akses, keuntungan dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengambil data yang sudah disediakan yang akan digunakan sebagaimana mestinya (Musdalifah, 2020:5).

Gaya Kepemimpinan

Fiedler (1967) berpendapat bahwa, kepemimpinan pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan kekuasaan dan pengaruh yang dilakukan dengan pola hubungan antara individu-individu terhadap sekelompok orang, yang bekerjasama dalam menggapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi didukung oleh sistem yang dibangun oleh aktivitas organisasi serta sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Sebagai salah satu komponen dalam pencapaian tujuan organisasi, sistem kepemimpinan yang dimiliki sangat berperan penting (Daswati, 2012:784).

Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Hasil penelitian Azizah (2015) menyatakan bahwa, semakin baik dan efektif suatu sistem dalam pengendalian internal yang dimiliki oleh pemerintah, serta dapat diterapkan secara menyeluruh akan mampu menciptakan suatu pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dalam penelitian Babulu (2019) menyatakan bahwa didalam pengelolaan dana desa dibutuhkan keterlibatan masyarakat, karena didalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, pelibatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas di desa. Seperti Arifin (2007) yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyatakan bahwa dalam kemajuan pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Penelitian Sarah, dkk (2020) menyatakan bahwa hasil dari pengelolaan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dapat disebabkan oleh kompetensi yang cukup baik, yang dimiliki sumber daya manusia yang ada didalamnya. Kompetensi yang baik mendukung pemahaman yang baik pula oleh aparat desa tentang tata cara mengelola dana desa, sehingga pengelolaan tersebut menjadi semakin akuntabel.

Hasil penelitian Mustofa (2012) dan Azizah (2018) mengatakan bahwa aksesibilitas mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif atau searah, dimana nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa akan menurun atau meningkat apabila terjadi kenaikan atau penurunan terhadap aksesibilitas laporan keuangan.

Naelavika (2018) menyatakan bahwa pada hakikatnya seorang kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan desa, oleh karena itulah mengapa gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa dianggap suatu hal yang sangat penting. Dalam penelitian Setyowati, dkk (2020) yang juga meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan, dan hasilnya gaya kepemimpinan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif dan signifikan, yang artinya semakin tepat gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin maka akan meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Sari, dkk (2020) menyatakan bahwa dalam memberi kepastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan rencana telah berjalan sesuai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan tujuan pemerintah, dengan efektif dan efisien dapat tercapai adalah dengan menggunakan pengendalian internal. Pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan pengendalian internalnya agar dapat mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan, suatu pengendalian internal yang baik, maka harus menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan.

Sulistyo dan Supami (2019) menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Keikutsertaan masyarakat didalam merencanakan dan melaksanakan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa dengan mewujudkan program atau rencana pembangunan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, serta disepakati secara bersama-sama merupakan wujud dari pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Fachrun (2019) menyatakan bahwa partisipasi harus diutamakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa. Agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dana desa, maka keterbukaan mengenai informasi pengelolaan dana desa, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan laporan pencatatan dan administrasi keuangan sangat perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian tersebut, Syahmardan (2012) mengatakan bahwa pada masa reformasi, bingkai transparansi di nyatakan sebagai partisipasi yang diberi makna keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dalam pembangunan desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, akan mewujudkan pengelolaan yang semakin akuntabel.

Kompetensi diartikan sebagai daya yang dimiliki seseorang dalam mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang diberikan sesuai dengan bidangnya

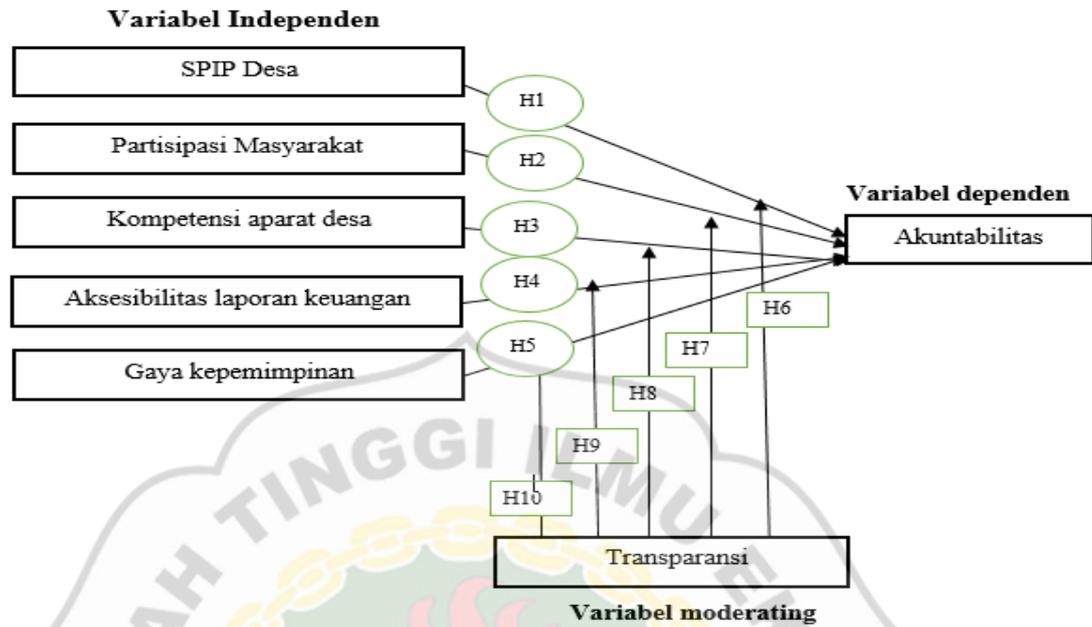
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Prawiro, 2019). Dalam pengelolaan dana desa, kompetensi yang dimiliki aparat desa sangat penting untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Dengan kompetensi memadai yang dimiliki, khususnya dalam menyajikan laporan keuangan, akan mendukung tersajinya sebuah laporan keuangan yang baik. Dalam penyusunan laporan keuangan, pemberian informasi yang jujur dan terbuka akan menciptakan akuntabilitas terhadap publikasi laporan keuangan tersebut (Ermino, 2017: 4).

Penelitian Arumanti (2018) menyatakan bahwa sebagai salah satu variabel yang mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel, laporan keuangan harus didukung pula dengan kemudahan dalam mengakses bagi para pengguna laporan tersebut. Kemudahan dalam mengakses yang dimaksud adalah seperti tersedianya akses melalui website resmi pemerintah desa dengan penyebaran informasi kepada masyarakat umum yang wajib untuk terus diperbaharui, sehingga akuntabilitas pengelolaan terhadap publik dapat berjalan efektif. Artinya, segala indikator transparansi, seperti keterbukaan, ketersediaan, kelengkapan informasi dan lain sebagainya meningkatkan atau memperkuat hubungan antara akses laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam proses perkembangan suatu organisasi, dijelaskan bahwa saat pemerintah transparan terhadap keuangan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut akuntabel, dan akuntabilitas tersebut akan memperbaiki kinerja organisasinya (Dubnick, 2005). Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh pimpinan dalam kebijakan sistem pemerintahan daerah tidak akan memberikan manfaat, jika nilai dan prinsip dari transparansi tidak diterapkan dalam proses kerja organisasi (Lubis, 2020).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



H1: Sistem pengendalian internal desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2: Partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas **pengelolaan** dana desa.

H4: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H5: Gaya Kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H6: Transparansi pengelolaan keuangan memoderasi hubungan antara pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H7: Transparansi pengelolaan keuangan memoderasi hubungan antara pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H8: Transparansi pengelolaan keuangan memoderasi hubungan antara pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H9: Transparansi pengelolaan keuangan memoderasi hubungan antara pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H10: Transparansi pengelolaan keuangan memoderasi hubungan antara pengaruh gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

	Min	Max	Mean	Standart Deviasi
X1	1,60	4,00	3,0633	0,74618
X2	1,83	4,00	3,1367	0,75659
X3	2,00	4,00	2,8628	0,71652
X4	2,00	4,00	3,1320	0,67448
X5	2,00	4,00	3,0200	0,70080
Y	2,00	4,00	3,1633	0,74144
Z	2,00	4,00	2,9233	0,69589

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Regresi berganda (Uji T)

Setelah data penelitian sudah terkumpul, data tersebut diolah menggunakan uji regresi linier berganda dengan persamaan koefisien regresinya sebagai berikut:

$$Y = 498,291 - 0.374 X1 + 0.023 X2 - 0.246 X3 + 0.208 X4 - 0.232 X5 + e$$

Dalam pengujian hipotesis dengan Uji T, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Ttabel	Thitung	Sig	Alpha	Hipotesis
X1	Y	-2.645		0,011	0.05	Diterima
X2		0.187		0,853		Ditolak
X3		-1.831		0,074		Ditolak
X4		1.518		0,136		Ditolak
X5		-2.027		0,049		Diterima

Analisis Regresi Moderasi (Uji Interaksi)

Pada penelitian ini dilakukan uji regresi moderasi dengan uji interaksi, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian antara X dan Z yang menggambarkan pengaruh variabel pemoderasi yaitu variabel Z terhadap hubungan variabel X dan Y, dimana X merupakan pengaruh langsung dari variabel Y, dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel Interaksi	Variabel Terikat	Alpha	Sig	Hipotesis
Z	Y	0,05	0.181	Ditolak
X1.Z			0.660	
Z			0.164	Ditolak
X2.Z			0.355	
Z			0.193	Ditolak
X3.Z			0.158	
Z	0.098	Ditolak		
X4.Z	0.749			
Z	0.130	Ditolak		
X5.Z	0.289			

PEMBAHASAN

Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh tidak searah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internalnya sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, namun tidak mencapai pengelolaan dana yang akuntabel. Hasil ini didukung oleh Yudianto dan Sugiarti (2017) yang menerangkan bahwa faktor pendukung keberhasilan pengelolaan keuangan adalah bagaimana sistem yang diterapkan dalam pengendalian internalnya, namun hal tersebut tidak cukup mempengaruhi komponen terkecil dari pemerintahan. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel diperlukan sebuah rasa tanggung jawab tinggi yang harus dimiliki oleh semua aparat dalam praktik

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjalankan tugas menurut standar organisasi, agar tujuan pemerintah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini berarti bahwa penyebab hubungan negatif tersebut adalah faktor perilaku individu dari pemerintah desa, karena pengendalian internal tidak dapat mendeteksi kerjasama dan perkomplotan yang dilakukan oleh personil dalam organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri (Maruta, 2015).

Partisipasi masyarakat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Artinya dalam tercapainya pengelolaan dana desa yang akuntabel tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar atau kecilnya keterlibatan warga dalam proses pelaksanaan dana desa. Seringkali partisipasi masyarakat hanya sebatas fungsi pengawasan saja, oleh sebab itu partisipasi tersebut belum bisa meminimalisir tingkat kesalahan, kecurangan dan penyimpangan yang akan dilakukan oleh aparat (Aprilya, 2020: 17).

Kompetensi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian Fauzi (2018) yang menyatakan bahwa tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, tidak menjamin hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan sebaliknya kompetensi aparat yang rendah belum tentu akan menurunkan akuntabilitas. Kompetensi yang tinggi dimiliki oleh seorang pegawai, akan tetapi ia kurang menikmati pekerjaannya, atau tidak ada rasa memiliki terhadap organisasi dimana ia

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bekerja, maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya, yaitu menjadi tidak maksimal (Wardhana, dkk 2015: 576).

Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian menyatakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya walaupun semakin mudah akses yang diberikan dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan maka pengelolaan dana desa tersebut tidak menjamin bahwa pengelolaannya akuntabel. Kemudahan dalam mengakses laporan sejatinya memang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, namun pada kasus yang terjadi di Kecamatan Sengah Temila, kemudahan dalam mengakses laporan keuangan belum sepenuhnya memadai, dan juga kebanyakan warga masih kurang memiliki ketertarikan untuk mengetahui pelaporan keuangan desa tersebut. Hal tersebut menjadikan aksesibilitas ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.

Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Semua aparat yang bekerja harus profesional, serta tugas dan wewenang masing-masing yang harus diselesaikan secara bertanggung jawab, tanpa harus mendapat dorongan dari pimpinan terlebih dahulu, sehingga dukungan dari seorang pimpinan kepada bawahan sejatinya tidak mempengaruhi kinerja

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

karyawan, namun hal tersebut dapat disimpulkan sebagai usaha untuk menjalin hubungan baik antara pimpinan dan bawahannya.

Transparansi pengelolaan keuangan tidak dapat memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

Dalam penelitian ini transparansi hanya berperan sebagai *Homogliser* (moderasi potensial), karena variabel transparansi keuangan tidak berinteraksi dengan semua variabel bebas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sengah Temila.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: (1) **Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh tidak searah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.** (2) **Partisipasi masyarakat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.** (3) **Kompetensi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.** (4) **Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.** (5) **Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.** (6) **Transparansi pengelolaan keuangan dalam penelitian ini tidak dapat memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.**

KETERBATASAN DAN SARAN

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 3 desa, dari total 14 desa di Kecamatan Sengah Temila, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulannya menjadi kurang sempurna dan hasil penelitian ini belum dapat menggeneralisasi seluruh aparat desa di Kecamatan Sengah Temila.

Penelitian ini hanya didasarkan pada data primer dari kuesioner, yang menyebabkan persepsi responden dalam memberikan jawaban terhadap kuesioner kurang menggambarkan kenyataan atau keadaan sebenarnya yang diinginkan oleh peneliti.

Penggunaan variabel-variabel dalam penelitian ini belum cukup untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga ada variabel lain yang perlu ditambahkan dan ditinjau kembali.

Peneliti hendaknya dapat lebih memperbanyak jumlah sampel yang digunakan dengan menambahkan populasi di Kecamatan lain agar hasil penelitian dapat menggeneralisasi semua aparat desa dalam populasinya, dan juga menggunakan teknik pengambilan sampel lain yang lebih tepat.

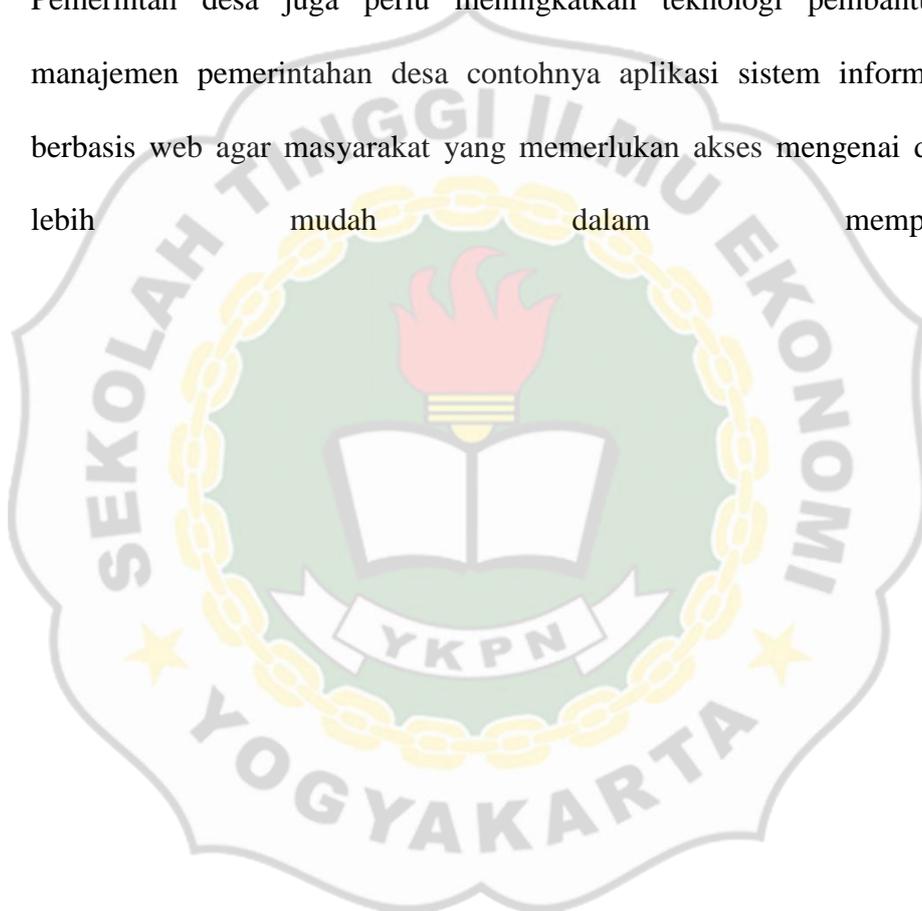
Peneliti selanjutnya juga perlu menambahkan variabel bebas ataupun variabel pemoderasi lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pengalaman peneliti, penggunaan data primer, khususnya kuesioner masih kurang efektif untuk digunakan, kebanyakan responden tidak serius dan hanya asal-asalan dalam mengisi kuesionernya, sehingga data yang diperoleh tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perlu ada peningkatan kompetensi dari aparat yang bekerja di pemerintahan desa, baik dari pengetahuan, *skill*, maupun *attitude*. Hal ini bisa diwujudkan dengan menetapkan standar kompetensi untuk pegawai yang bekerja di pemerintahan desa.

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan teknologi pembantu dalam manajemen pemerintahan desa contohnya aplikasi sistem informasi desa berbasis web agar masyarakat yang memerlukan akses mengenai data desa lebih mudah dalam memperolehnya



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., A. Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 (2): 97-189.
- Aprilya, K.R. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9 (3): 1-20.
- Arifin, S. (2007). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa & Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Desa, Suatu Perspektif dari Segi Ketahanan Nasional: studi kasus Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. *Tesis*. Universitas Indonesia Jakarta.
- Arumanti, N.R. (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa). *Skripsi*. UIN Allaudin Makasar.
- Azizah, N, Junaidi, A.R, Setiawan. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal riset dan aplikasi: Akuntansi dan manajemen*, 1 (2): 111 – 120.
- Babulu, N.I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (2): 18-26.
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinandengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *Jurnal Academica Fisip*, 04 (1): 783-798.
- Dubnick, M. (2005). Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms. *Performance & Management Review* (3). 76-417.
- Ermino, Rendy. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Fachrun, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Fauzi, Achmad. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Hariyati, Lintang, V., Harianti, A. (2018). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/17>. Diakses 12 Agustus 2021.
- Lubis, V.Z.F. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Anggaran Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Mahayani, N.L.A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12 (2): 129-144.
- Maruta, Heru. (2015). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. Skripsi. STIE Syariah Bengkalis, Riau.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. *Skripsi*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Mustofa A.I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nelavika dan Hafidhah. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kangayan. *Skripsi*. Universitas Wiraraja
- Nurmalasari, Desi. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Prawiro, M. (2019). Definisi, Jenis-Jenis, dan Manfaat Kompetensi. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-kompetensi.html>. Diakses, 22 Agustus 2021.
- Sarah, S, T. Taufik, D. Safitri. (2020). The Effect Of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization Of Information Technology, Community Participation And Internal Control System Of The Accountability Of Villagemanagement In Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Riau*. 4 (4): 330-342.
- Sari, P.S., Citra, S.M., dan Dekeng, S.B. (2020). The Importance Internal Control To Improve Transparency And Accountability Of Regional Financial Management. *Jurnal Akuntansi*, 6 (1): 1-10.
- Setyowati, dkk. (2020). Antecedents Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Economic, Business And Engineering*. 2 (1): 55-65.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Syahmardan. (2012). Public Participation: Transparency Design For Forming Of Democratic Legislation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9 (1): 135-150.
- Sukmawan, 2013. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Hukum*. Universitas Brawijaya.
- Sulistyo dan Supami, W.S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. 7 (1): 1-9
- Wardhana, G.A.S., Ni, K.R., Ida, B.PA. (2015). Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (9): 571- 598.
- Wibowo, D.M. (2019). Dana Desa sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa. <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. Diakses 12 Agustus 2021
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.